

OPINI

PBB dan Pemerintahan Jokowi

UNITED Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir pada 24 Oktober 1945. Berarti tepat pada hari ini PBB berusia 69 tahun. Dalam usia yang tak lagi muda sudah semestinya ini menjadi momentum refleksi sejauh mana PBB telah menjalankan perannya. PBB sebagai organisasi internasional terbesar pertama-tama didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian pasca Perang Dunia II. Dalam perkembangannya PBB juga menjadi lembaga kerja sama, utamanya dalam bidang sosial, kemanusiaan, ekonomi, dan budaya negara-negara di dunia.

PBB merupakan media yang merefleksikan kepentingan banyak negara. Hingga saat ini jumlah anggota PBB sebanyak 193 negara. Sayangnya sampai saat ini PBB sebagai wadah interaksi negara-negara secara internasional mengalami pergeseran akibat tarik-menarik kepentingan masing-masing negara. Terutama negara-negara super power yang cenderung memaksakan kepentingannya pada negara-negara *low power*.

PBB tampak lebih berperan sebagai instrumen bagi negara-negara super power dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Apalagi dengan dominannya negara-negara super power dalam keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan negaranya dengan mudah dikenai veto. Keterikatan PBB terhadap negara-negara super power membuat PBB hingga saat ini belum bisa menjadi organisasi internasional yang benar-benar independen dalam menyuarkan nilai-nilai universal.

PBB memiliki enam badan utama yaitu Majelis Umum, dewan keamanan, dewan ekonomi dan sosial, dewan perwalian, mahkamah internasional dan sekretaris jenderal (sekjen). Bila dianalogikan negara, sekjen memegang peran eksekutif yang menjalankan kegiatan sehari-hari. Selama 69 tahun PBB telah memiliki 8 orang sekjen. Sekjen PBB pertama Trygve Lie, diplomat dari Norwegia. Berikutnya berturut-turut Dag Hammarskjold (Swedia), U Thant (Myanmar), Dr Kurt Waldheim (Austria), Javier Perez de Quellar (Peru), Boutros-Boutros Ghali

Hendra Kurniawan

(Mesir), Kofi Annan (Ghana) dan sekarang Ban Ki-Moon dari Korea Selatan.

Ban Ki-Moon sudah dua kali menjabat Sekjen PBB dan masa jabatannya akan berakhir pada 2017. Sekjen PBB bukanlah jabatan sembarangan, ini merupakan jabatan internasional yang sangat prestisius. Menariknya kemarin menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat digadang-gadang untuk menduduki jabatan sebagai Sekjen PBB. Lepas dari berbagai hal yang bisa mengganjal, jika nantinya SBY benar-benar mampu meraih jabatan internasional itu tentu akan membawa pengaruh positif bagi Indonesia.

Indonesia sejak dulu sebenarnya sudah diperimbangkan dalam forum PBB. Sekali pun Indonesia sempat keluar dari PBB sebagai eksekutif dari Ganyang Malaysia, namun Presiden Soekarno saat itu menjadi tokoh yang disegani di mata internasional. Soekarno pernah berpidato di hadapan Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Pidatonya yang berjudul 'To Build The World A New' (Membangun Dunia Baru) mendapat sambutan hebat.

Selama 10 tahun pemerintahan SBY, satu hal yang patut diapresiasi ialah keberhasilan menjalin hubungan luar negeri. Indonesia makin dipercaya dalam pergaulan internasional. Beberapa pertemuan tingkat dunia seperti APEC, ASEAN, Non Blok, Bali Democracy Forum, dan lainnya sukses digelar di Indonesia. SBY dinilai memiliki kemampuan dan kecakapan dalam diplomasi internasional. Kiranya tak berlebihan apabila SBY lantas diusulkan untuk menjadi Sekjen PBB.

Pemerintahan Jokowi-JK saat ini tentu diharapkan dapat meneruskan hubungan internasional yang telah terjalin dengan

baik dan efektif. Dari berbagai pengalaman dan kemampuannya menyelesaikan persoalan di tingkat lokal dan nasional, Jokowi telah berhasil menunjukkan kemampuan diplomasi yang unggul. Hal ini kiranya dapat menjadi modal dalam menjalankan diplomasi luar negeri terkait dengan posisinya sekarang sebagai presiden. Jokowi harus mampu membawa Indonesia menunjukkan kemampuan dan perannya dalam hubungan internasional agar tidak senantiasa menjadi objek negara-negara super power.

Konsistensi terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif harus tetap dipegang. Bung Hatta sebagai pencetus pemikiran ini menyebutkan sebagai mendayung di antara dua karang. Bebas berarti Indonesia harus berani menentukan jalannya sendiri. Aktif artinya Indonesia harus terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.

Di bawah Presiden Jokowi, Indonesia harus semakin berdaulat dan memiliki posisi tawar yang tinggi bagi dunia internasional. PBB dan banyak negara di dunia juga telah menunjukkan respons positif terhadap pemerintahan Jokowi. □ - k.

*) *Hendra Kurniawan, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*